



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
UNIT KERJA : INSPEKTORAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

- Nama** : ERIES MUNGgaran
- Jabatan** : AUDITOR
- NHK** : 700169

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 750.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 196 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA SUKABUMI , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 146.000.000

- MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR MATIC Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
- MOTOR, YAMAHA B65 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
- MOBIL, TOYOTA RUSH 1.5GMT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000
- MOTOR, YAMAHA BJM/AT Tahun 2023, LAINNYA Rp. 22.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 54.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 18.305.787

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 968.305.787

III. HUTANG Rp. 273.281.079

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 695.024.708

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik



Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.